



Sistim Jaringan Pelaporan Digagas

Akan Menghubungkan antara SKPD, DPDPK dan BPK

YOGYAKARTA – Guna memudahkan proses pengawasan kegiatan pembangunan, Pemkot Yogyakarta akan membangun sistem jaringan reporting pelaksanaan kegiatan.

Sistem ini akan menghubungkan antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK), dan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 "2015 diharapkan sudah *start*

untuk jaringan laporan ini. Tak hanya untuk pengawasan, namun juga untuk mempercepat proses pemeriksaannya," tandas Wakil Walikota Imam Priyono, kemarin.

Dengan target tersebut

Pemkot membutuhkan penyelenggaraan pelatihan dan pembekalan mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal tersebut untuk memperkuat kapasitas baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaan.

Pelatihan tersebut dibutuhkan untuk menjaga sistem, mulai dari perencanaan, pelaksanaan laporan hingga evaluasi dapat berjalan dengan baik. Tertatanya sistem yang di-

bangun dapat mendukung terbangunnya sistem pengawasan yang berjalan dengan sendirinya karena adanya pemahaman yang sama untuk mengantisipasi terjadinya korupsi.

Terbangunnya sistem yang baik dikatakan Imam Priyono akan semakin solid jika tidak terjadi konflik kepentingan. *conflict of interest* diklaimnya tidak akan muncul jika ada pemahaman yang sama sehingga terbangun si-

nergisitas untuk memberantas korupsi.

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta berinisiatif membangun tiga produk hukum untuk mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ketiga program yang dibangun adalah, *wistle blower system*, pengawasan rekening pegawai dan gratifikasi.

Ketiga program tersebut dibangun dengan sistem berjaringan melibat-

kan lembaga anti rasuah KPK dan PPATK. Termasuk ke Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemkot Yogyakarta dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik Inspektorat Daerah Fitri Paulina mengatakan, hingga akhir tahun ini produk hukum tentang *wistle blower*, gratifikasi dan pengawasan rekening ter-

sebut masih dalam proses. Namun demikian, diharapkan 2014 mendatang sudah dapat mulai direalisasikan.

Khusus untuk *wistle blower*, akan diatur mengenai sistem mekanisme pelaporan dan upaya perlindungan kepada saksi pelapor. "Di dalamnya akan mengatur formalitas sistem pelaporan dan bagaimana perlindungan untuk pelapor," tandasnya.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Inspektorat			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005